

Judul : Berantas stunting di NTT, ayo makan ikan
Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Berantas Stunting Di NTT Ayo, Makan Ikan

ANGGOTA Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema mengapresiasi program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan di daerah pilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan kondisi geografis wilayah didominasi lautan, NTT memiliki potensi sumber daya alam perikanan yang cukup besar.

"Kekayaan hasil perikanan laut ini sangat potensial meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan usaha dari hulu ke hilir," kata Yohanis saat menghadiri kegiatan Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Perikanan, secara virtual, Kupang, kemarin.

Adapun pelatihan diselenggarakan atas kerjasama Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta *stakeholders* yang terlibat di dalamnya.

Pelatihan diharapkan dapat memotivasi, serta mengembangkan produk olahan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam perikanan laut.

Sehingga, hasil alam kekayaan NTT dapat diolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi dan diminati konsumen.

"Saya berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta, dapat mewujudkan seperti Program Pemerintah seperti Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan," tambah dia.

Sementara, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta menuturkan, pihaknya terus mengkampanyekan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan ini.

Salah satunya dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam mengolah beraneka produk diversifikasi perikanan. Hal ini guna menekan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024 mendatang, sebagaimana target Presiden Jokowi.

Adapun kegiatan pelatihan ini bagian dari komitmen KKP mempersiapkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang unggul, dengan mengedepankan ekologi dan peningkatan ekonomi berkelanjutan.

BRSDM, lanjutnya, berkomitmen mempersiapkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan mendorong konsep *Blue Economy*.

"Hal ini mengedepankan keseimbangan ekologi dan mendukung peningkatan ekonomi berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan program strategis KKP," jelasnya.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Provinsi NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah.

Status merah tersebut berdasarkan prevalensi *stunting* yang masih di atas 30 persen. Salah satunya di Kabupaten Kupang. Selain itu, di NTT terdapat tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20-30 persen, dan salah satunya Kota Kupang.

"Pelatihan ini bertujuan untuk mendukung perbaikan rantai nilai dari hulu ke hilir, serta menekan angka stunting di Kabupaten Kupang melalui program Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan," ujar Radiarta. ■ KAL